BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan penelitian dan pembahasan berfokus pada beberapa pidato yang diteliti terdapat 13 teks pidato yang berlangsung dari pidato Maret tahun 2020 dimana awal mula adanya pandemi Covid-19 hingga tahun Januari 2021. Teks pidato tidak hanya berkenaan dengan cara Presiden Joko Widodo memberikan teks pidato dalam bentuk pelaporan perkembangan dan penangannya saja, tetapi juga terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait tanggapan pandemi Covid-19.

4.1 Temuan

4.1.1 Makna Interpersonal

Makna interpersonal ditelaah pada teks pidato politik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dalam menyampaikan tanggapannya terhadap terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Pada penelitian ini, ditelaah 5 teks pidato yang disampaikan dari bulan Maret hingga Oktober tahun 2020, dengan temuan terdapat 26 klausa. Hasil 25 klausa tersebut terbagi atas 14 klausa deklaratif dan 12 klausa imperatif.

4.1.1.1 Mood

Analisis mood mengarah pada pernyataan yang dapat dianalisis secara makna interpersonalnya. Mood memiliki peran penting dalam mewujudkan makna interpersonal karena itu adalah titik dalam membentuk sikap penilaian pembicara. Ketika mengambil teks, ia memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi interpersonal klausa. Berikut disampaikan pada tabel 4.1 temuan mood yang digunakan pada teks pidato politik Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19:

Tabel 4.1 Jumlah Temuan Mood

Jenis Mood	Deklaratif	Imperatif
Total	14	12
Persentase	53,84%	46,16%

Sumber: Hasil Olah dan Analisis Data Peneliti (2021)

Jenis mood pertama adalah bentuk deklaratif, dimana bentuk ini menjadi mood yang dianggap dominan dalam teks pidato Presiden Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19. Deklaratif menjadi bentuk klausa yang berisi pernyataan dalam menuturkan informasi. Paparan yang mengungkap bahwa klausa dalam pidato Presiden Joko Widodo sebagian besar bersifat deklaratif. Dengan demikian, klausa deklaratif pada teks pidato merujuk pada upaya Presiden Joko Widodo dalam memberikan informasi mengenai pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Contoh klausa deklaratif adalah:

- C4 Pemerintah telah mulai melakukan *rapid test* sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi Covid-19 ataukah tidak (1c)
- C5 Saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini (3a)

Berdasarkan contoh diatas, klausa deklaratif mengarah pada bentuk informasi. Pada contoh C4 disajikan pemaparan teks yang mana terdapat informasi "rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal". Hal ini dimaknai sebagai bentuk informasi dalam mengindikasikan orang yang terindikasi positif Covid-19. Selain itu, pada contoh C5 disajikan pemaparan teks berupa informasi apresiasi terhadap tenaga kesehatan yang berperan dalam menekan dan meminimalisir pasien yang terinfeksi Covid-19.

Pemerintah	telah	melakukan	sebagai upaya untuk memperoleh
	mulai	rapid test	indikasi awal apakah seseorang positif
			terinfeksi COVID-19 ataukah tidak
Subjek	Finite	Predicator	Complement
MOOD: De	klaratif	RESIDU	

Selain itu, klausa deklaratif juga mengarah pada bentuk perintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya sebagai gambaran kebijakan selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- C6 Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan dan masalah sosial ekonomi yang mengikutinya (1i)
- C7 Saya telah perintahkan kepada semua Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD (2b)

Saya	telah	kepada semua Menteri,	agar memangkas rencana	
	perintahkan	Gubernur, Bupati, dan	belanja yang tidak prioritas	
		Wali Kota	di APBN maupun di APBD	
Subjek	Finite	Predicator	Complement	
MOOD: De	klaratif	RESIDU		

Berdasarkan contoh diatas, dapat dikategorikan adanya klausa deklaratif berupa perintah dapat dipahami dengan adanya ciri kalimat "perintahkan" dan "menggerakan". Subjek pada kalimat memiliki fungsi sebagai bentuk perintah dan penggerak dalam merealisasikan penekanan kasus pandemi Covid-19 kepada masyarakat.

Jenis mood kedua yaitu imperatif, yang mana klausa ini merupakan penegasan dari adanya perintah atau larangan. Pada teks pidato ini Presiden Joko Widodo banyak memberikan himbauan, harapan, larangan, dan peringatan kepada masyarakat mengenai pandemi Covid-19 ini. Contoh klausa imperatif tersaji sebagai berikut:

C8 Saya minta ini diberikan prioritas khusus untuk yang *testing*, *tracing*, dan *treatment* di delapan provinsi, yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua (4a)

C9 Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sampai ke level kelurahan dan desa untuk selalu tanggap terhadap situasi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat (2f)

Saya	mengajak	seluruh	jajara	n	untuk	selalu	tanggap
		pemerintah,	baik d	li	terhadap	situasi	kesehatan
		pusat mau	ipun d	li	dan k	ondisi	ekonomi
		daerah, samp	ai ke leve	el	masyaral	cat	
		kelurahan dar	ı desa				
Subjek	Finite	Predicator			Complei	ment	
MOOD: In	peratif	RESIDU					

Berdasarkan contoh diatas, makna interpersonal dapat dikategorikan dalam teks pidatonya merujuk pada dua bentuk yaitu, memberikan arahan dan ajakan kepada masyarakat agar mampu bertahan selama masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu juga, bentuk imperatif ini mengarah pada pemahaman kepada masyarakat akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19.

4.1.1.2 Modalitas

Analisis modalitas difokuskan pada unsur klausa yang melihat derajat posisi penutur berupa sikap yang ingin disampaikan dalam sebuah teks. Modalitas menunjukkan penilaian pembicara tentang probabilitas kewajiban yang terlibat dalam apa yang dia katakan. Modalitas ini terdiri dari klasifikasi modalitas. Pada teks pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 pertama adalah yang berkaitan dengan modalitas dinamik. Modalitas dinamik merupakan klasifikasi modalitas yang berkaitan dengan kemampuan. Contoh modalitas dinamik ini adalah sebagai berikut:

C10 Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia (2a)

C11 Saya juga mengapresiasi gerakan masyarakat yang telah turut menyosialisasikan, memasyarakatkan *physical distancing* atau jaga jarak aman yang terus mengingatkan kita semuanya untuk berdisiplin (2g)

Berdasarkan contoh diatas, modalitas dinamik merujuk pada adanya kemampuan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo melalui teks pidatonya. Pada contoh C10 terdapat kata "*terus bekerja keras*" yang mengarah pada kemampuan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan stabilitas perekonomian masyarakat. Selain itu, pada contoh C11 juga terdapat kata "*yang telah turut*" dimaknai sebagai bentuk keberhasilan dari adanya kemampuan penanganan pandemi Covid-19.

Jenis modalitasyang kedua adalah intensional yang berkaitan dengan adanya derajat keyakinan. Pada teks pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo adanya klausa merujuk pada keyakinan terhadap penanganan pandemi Covid-19. Contoh modalitas intensional ini adalah sebagai berikut:

C12 Pemerintah telah mulai melakukan *rapid test* sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 ataukah tidak (1c)

Berdasarkan contoh diatas, modalitas intensional merujuk pada informasi dengan klausa "telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal". Hal ini menunjukkan adanya derajat keyakinan berkaitan dengan indikasi penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian, pada teks pidato Presiden Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 yang mana terdapat 26 klausa hanya terdapat 3 klausa yang mengarah pada bentuk modalitas baik dinamik maupun intensional.

Aspek modalitas juga dinilai dari tingkat kemungkinan terjadi atau tingkat kedekatan pandangan terhadap polarnya berupa probabilitas, keseringan, keharusan, dan kecenderungan. Pada kategori pertama modalitas yang memiliki tingkatan tinggi (high), yakni aksi yang paling dekat dengan polar "ya" dan paling mungkin terjadi, contohnya sebagai berikut:

C13 Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sampai ke level kelurahan dan desa untuk selalu tanggap terhadap situasi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat (2f)

Berdasarkan contoh diatas, nilai modalitaspada kategori tinggi muncul dari klausa "untuk selalu tanggap" yang merujuk pada bentuk keseringan. Pada teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 ini dimaknai sebagai bentuk ajakan kepada jajaran pemerintahan pusat hingga daerah untuk selalu mempertimbangkan situasi kesehatan dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Pada kategorikedua modalitas yang memiliki tingkatan menengah (*medium*), yakni antara tingkat tinggi dan rendah dan pelaksanaannya bisa "ya" atau "tidak". Contoh dari kategori menengah ini adalah sebagai berikut:

C14 Saya harapkan nanti yang disampaikan adalah bukan laporan (tetapi) apa yang harus kita kerjakan *problem* lapangannya apa, sudah, dan pendekpendek (3b)

Berdasarkan contoh diatas, nilai modalitas kategori menengah muncul dari klausa "harapkan nanti yang". Hal ini merujuk pada bentuk keharusan. Pada teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 ini dimaknai sebagai bentuk harapan mengenai penanganan pandemi Covid-19 dari adanya laporan permasalahan lapangan.

Pada kategori ketiga modalitas yang memiliki tingkatan rendah (*low*), yakni paling dekat dengan polar "tidak" dan paling mungkin tidak terjadi. Contoh dari kategori rendah ini adalah sebagai berikut:

C15 Kita ingin ini segera bergerak di lapangan karena kondisi, seperti di Jakarta laporan terakhir yang saya terima angka *positivity rate*-nya melonjak dari 4-5 (persen) sekarang sudah 10,5 persen (3c)

Berdasarkan contoh diatas, nilai modalitas kategori rendah muncul dari klausa "*ingin ini segera*". Hal ini merujuk pada bentuk kecenderungan. Pada teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 ini dimaknai sebagai bentuk kecenderungan mengenai angka pandemi Covid-19 dalam bentuk persentase jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19.

4.1.1.3 Kata Ganti

Kata ganti merujuk pada subjek merupakan hal yang diperlukan dalam membentuk proposisi yaitu sesuatu dengan referensi, dimana proposisi dapat ditegaskan atau dibantahkan. Pemakaian kata ganti orang seringkali digunakan dalam pidato tokoh politik di Indonesia tidak terkecuali presiden. Pada pembukaan pidato, seringkali diawali dengan menyapa salam kepada para hadirin menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Penggunaan kata ganti orang pertama tunggal saya lebih mempunyai makna untuk menonjolkan diri dan merujuk pada bentuk eksistensi dirinya sebagai seorang yang mempunyai kapasitas untuk menyampaikan pidatonya di depan para hadirin.

Selain itu, dalam isi atau tubuh pidato tidak hanya memaparkan apa yang ingin disampaikan, tetapi juga lekat penggunaan kata ganti orang pertama, kata jamak hingga kata ganti lainnya. Subjek dalam klausa diinterpretasikan dalam bentuk nomina hingga pronominal, sehingga hal ini sangat berkaitan erat dengan penyampaian makna dan fungsi interpersonal.

Pada teks pidato politik Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 terdapat subjek klausa terinterpretasikan berupa kata *Saya*, *Pemerintah*, dan *Kita*.

- C1 **Saya** tegaskan lagi bahwa kita harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran Covid-19 (1a)
- C2 **Pemerintah** terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia (2a)
- C3 **Kita** terus bersama-sama menangani pandemi ini bergotong royong, bersatu padu karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya (3c)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan subjek pada teks pidato politik mengenai tanggapan pandemi Covid-19 diungkapkan dalam bentuk kata nomina (*Saya*, *Pemerintah*, dan *Kita*). Berikut disampaikan pada tabel 4.2 temuan

subjek dari kelima teks pidato politik Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19:

Tabel 4.2 Subjek dalam Teks Pidato

Subjek	Kode Klausa	Total
Saya	1a, 1b, 1g, 1i, 1j, 2b, 2c, 2e, 2f,	16
	2g, 2h, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a	
Pemerintah	1c, 1d, 1e, 1f, 1h, 2a	6
Kita	2d, 3c, 4c, 5c	4
Total		26

Sumber: Hasil Olah dan Analisis Data Peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, subjek yang paling sering digunakan adalah kata nomina "Saya", hal ini berkaitan dengan penyampaian Presiden Joko Widodo atas teks pidato yang bermakna memberikan pesan hingga tanggapan terhadap pandemi Covid-19. Kata ganti "Saya" yang banyak diungkapkan dalam isi pidato Presiden Joko Widodo dapat dimaknai secara interpersonal bahwa, adanya upaya penegasan sikap hingga harapan kepada publik. Selain itu, pada penutup isi pidato Presiden Joko Widodo banyak memberikan apresiasi hingga permohonan maaf dengan menggunakan kata ganti "Saya".

Kata ganti "Saya" disini mengacu pada pembicara pidato yaitu Presiden Joko Widodo. Artinya, orang yang paling bertanggung jawab atas pidato tersebut adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Dapat disimpulkan bahwa, penggunaan kata "Saya" dalam isi pidato Presiden Joko Widodo secara interpersonal mengarah pada bentuk penonjolan dirinya secara pribadi, sebagai kepala negara yang memiliki kuasa dalam penanganan pandemi Covid-19.

Subjek dominan kedua yaitu "*Pemerintah*", hal ini berkaitan dengan peran Presiden Joko Widodo sebagai elemen yang berwenang memberikan kebijakan dan upaya dalam penanganan pandemi Covid-19. Kata ganti "*Pemerintah*" menjadi bentuk kata ganti lainnya dengan pemakaian kata pada benda tertentu. Dalam isi pidato Presiden Joko Widodo terkait penanganan pandemi Covid-19, seringkali kata

ganti "*Pemerintah*" diungkapkan berkenaan dengan pihak-pihak yang berperan dalam diri pembicara dan pendengar secara interpersonal.

Dan terakhir, subjek "Kita" yang digunakan sebagai bentuk ajakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini semua klausa dapat dikatakan mengandung subjek finite, sehingga dapat mengungkapan makna interpersonal. Kata ganti "Kita" bersifat jamak, dimana kata ganti ini menunjukkan bahwa pembicara yaitu Presiden Joko Widodo melibatkan publik sebagai pendengarnya sehingga dapat memiliki persepsi yang sama terkait penanganan pandemi Covid-19.

Pemakaian kata ganti "Kita" secara interpersonal juga dapat diartikan bahwa tidak adanya kedudukan kekuasaan antara pembicara dan pendengar disini atau disebut sebagai kedudukan yang setara. Dalam beberapa ucapan, kata ganti "Kita" mengacu pada Presiden Joko Widodo dan semua masyarakat Indonesia. Hal ini memberi kesan adanya kesatuan antara pemerintah Indonesia dan seluruh warga negara dalam memberikan respon terhadap penanganan pandemi Covid-19. Kata ganti "Kita" tidak berdiri sendiri, tetapi ada semua masyarakat Indonesia yang mendukung pemerintah.

4.1.1.4 Representasi Makna Interpersonal

Situasi yang berbeda dari mulai awal Covid-19 hingga saat ini yang menunjukkan angka Covid-19 yang fluktuatif, ditunjukkan melalui penggunaan mood, modalitas, dan kata ganti dalam teks pidato. Semua jenis mood, modalitas, dan kata ganti ditemukan dalam pidato, peneliti menemukan bahwa ada empa tmakna interpersonal yang diwakili dari mood, modalitas, dan kata ganti dalam pidato.

1) Kepercayaan dan Komitmen

Probabilitas tinggi yang mengambil aspek dominan merujuk pada kepercayaan dan komitmen berkenaan dengan aspek klausa deklaratif. Berdasarkan analisis, peneliti menemukan bahwa beberapa probabilitas dan mood dalam klausa deklaratif mewakili kepercayaan dan komitmen daripembicara yaitu Presiden Joko Widodo. Analisis pertama adalah analisis suasana hati untuk mengetahui maksud dari pembicara. Contoh klausa dalam pidato dijelaskan sebagai berikut:

MOOD: De	klaratif	RESIDU			
Subjek	Finite	Predicator	•	Complei	ment
				maupun	di APBD
		Bupati, dan	Wali Kota	tidak pri	oritas di APBN
	perintahkan	Menteri,	Gubernur,	rencana	belanja yang
Saya	telah	kepada	semua	agar	memangkas

Subjeknya adalah "Saya" yang mengarah pada Presiden Joko Widodo, menunjukkan bahwa ia sebagai seseorang kepala negara yang memiliki tindakan terhadap jajaran pemerintahan dibawahnya. Adanya upaya dalam "memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD" menunjukkan bahwa tindakan minimalisasi anggaran baik APBN maupun APBD diprioritaskan untuk penanaganan Covid-19. Dalam teks tersebut juga belum merujuk pada upaya rencana yang perlu dilakukan oleh semua Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam teks pidato tersebut menunjukkan adanya seluruh residu yang memberikan informasi sekaligus perintah tentang tindakan apa yang akan dilakukan seharusnya. Sebagai seorang kepala negara, Presiden Joko Widodo mengetahui situasi negaranya dengan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19, sehingga ia memiliki kepercayaan dengan adanya pemangakasan anggaran yang tidak perlu dan berfokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat menjadi upaya yang memberikan kepercayaan dan komiten.

2) Empati dan Motivasi

Pandemi Covid-19 memberikan kesulitan bagi semua orang dan dalam banyak aspek, salah satunya yang paling terdampak adalah kondisi produtivitas perekonomian negara. Berdasarkan analisis, peneliti menemukan bahwa beberapa probabilitas dan mood dalam klausa imperatif yang mewakili empati dan motivasi dari pembicara yaitu Presiden Joko Widodo. Contoh klausa dalam pidato dijelaskan sebagai berikut:

Saya	mengajak	seluruh	jajara	n	untuk	selalu	tanggap
		pemerintah,	baik o	li	terhadap	situasi	kesehatan
		pusat mau	pun c	li	dan k	ondisi	ekonomi
		daerah, sampa	ai ke leve	el	masyaral	cat	
		kelurahan dar	n desa				
Subjek	Finite	Predicator			Comple	ment	
MOOD: In	peratif	RESIDU					

Sebagai seorang kepala negara, Presiden Joko Widodo memiliki empati untuk menanggapi situasi ini. Presiden Joko Widodo sering mendorong warga untuk bergabung dalam menangani Covid-19 dengan mengajak untuk menjaga protokol kesehatan secara ketat. Makna interpersonal ini terungkap dari upaya Presiden Joko Widodo untuk tanggap dalam penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya berkaitan dengan situasi kesehatan saja tetapi adanya dampak ekonomi.

Empati yang diberikan Presiden Joko Widodo sekaligus menjadi motivasi untuk semua warga negara mulai dari pemerintahan pusat hingga level desa untuk berada dalam garis depan menangani penyebaran virus Covid-19. Himbauan yang diberikan Presiden Joko Widodo ini menjadi motivasi agar semua elemen pemerintahan dan masyarakat bersatu melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk melindungi dan menyelamatkan dampak dari pandemi Covid-19.

3) Keseriusan Situasi dan Tindakan Pencegahan

Prinsip dasar yang merujuk pada keseriusan dan tindakan pencegahan ditunjukkan dengan upaya untuk melindungi diri dan meminimalisir pandemi Covid-19. Berdasarkan analisis, peneliti menemukan bahwa beberapa probabilitas dan mood dalam klausa deklaratif berupa perintah yang mewakili keseriusan dan tindakan pencegahan daripembicara yaitu Presiden Joko Widodo.Contoh klausa dalam pidato dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah	telah	melakukan	sebagai upaya untuk memperoleh
	mulai	rapid test	indikasi awal apakah seseorang positif
			terinfeksi COVID-19 ataukah tidak
Subjek	Finite	Predicator	Complement
Subjek MOOD: De		Predicator RESIDU	Complement

Keseriusan pandemi dan tindakan pencegahan untuk menanggapi situasi pandemi Covid-19 ini merujuk pada upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19. Upaya *rapid test* yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi sebuah upaya dalam melihat indikasi awal Covid-19 dalam diri seseorang agar tidak menyebar dengan cepat. Hal ini menjadi upaya tindakan pencegahan dan bagian keseriusan Presiden Joko Widodo menangani pandemi Covid-19.

4.1.2 Potensi Makna Politis

Setelah menelaah klausa yang berkenaan dengan potensi makna interpersonal, selanjutnya penelitian ini menelaah potensi makna politis dari teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19. Untuk menelaah potensi makna ini akan digunakan analisis *Systemic Functional Linguistics* (SFL). Gambaran potensi makna politis dalam teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 merujuk pada beberapa pendekatan bahasa yang tersaji pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Pendekatan Bahasa dalam Interpretasi Makna Politis

Pendekatan Bahasa	Kode Teks	Makna Politis
Fenomena sosial yang terwujud	C16, C17	Presiden Joko Widodo
dalam semiotik sosial		menunjukkan perannya sebagai
		kepala negara yang mencoba

		mengatasi permasalahan
		pandemi Covid-19
Teks yang konstrual dan	C18, C19	Presiden Joko Widodo ingin
merujuk pada konteks sosial		mengkonstruksi citra dirinya
		sebagai orang yang rendah hati
		dan memiliki kepedulian
		terhadap masyarakat

Sumber: Hasil Olah dan Analisis Data Peneliti (2021)

Berdasarkan pemaparan dalam tabel 4.3 diatas, pada penelaahan pendekatan pertama merujuk pada bahasa adalah fenomena sosial yang terwujud dalam semiotik sosial. Contoh dari pendekatan pertama ini adalah sebagai berikut:

- C16 Saya minta kepada kementerian dan lembaga dan juga pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota agar selain menangani isu kesehatan masyarakat kita juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah (2c)
- C17 Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan (5a)

Berdasarkan contoh diatas, pendekatan bahasa yang mengarah pada bentuk fenomena sosial tergambar dari kedua contoh tersebut. Pada contoh pertama C16 dilihat bahwa terdapat fenomena sosial berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19, tidak hanya berkaitan dengan penanganan aspek kesehatan saja tetapi juga dampak lainnya salah satunya ekonomi. Sedangkan pada contoh kedua C17 mengarah pada fenomena sosial yang mana adanya pandemi Covid-19 lebih mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran untuk secara bersama menjadikan kesehatan sebagai aspek yang diutamakan untuk saat ini.

Makna politis ini dapat diartikan sebagai bentuk dimensi praktik sosial berupa adanya ajakan. Penggalan isi pidato berupa "kesehatan publik tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan" sangat kental dengan ungkapan untuk melakukan ajakan kerjasama. Selama masa pandemi Covid-19, penanganan perlu

dilakukan dengan cara kerjasama dari semua pihak tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata tetapi tanggung jawab bersama.

Presiden Joko Widodo secara politis dalam isi pidatonya memberikan ajakan kepada publik untuk mengutamakan kesehatan. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai upaya jika kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan, maka pandemi Covid-19 akan segera teratasi. Namun apabila tidak ada dukunganbahkan tidak adanya kesadaran maka penanganan pandemi Covid-19 tidak akan kunjung selesai. Dari ungkapan tersebut,bisa dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengajak publik harus bersatu dan saling bekerjasama mewujudkan penanganan pandemi Covid-19 yang lebih baik.

Pada teks C16 ungkapan teks pidato "menangani isu kesehatan masyarakat kita juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, utamanya masyarakat lapisan bawah", yang menunjukkan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara yang memperlihatkan adanya kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Penciptaan makna politis yang disampaikan Presiden Joko Widodo secara jelas mengungkapkan dirinya amat berjasa dalam mengatasi pandemi Covid-19, yang merujuk pada ungkapan dampak dari pandemi Covid-19.

Penelaahan pendekatan kedua merujuk pada teks yang konstrual dan merujuk pada konteks sosial. Contoh dari pendekatan kedua ini adalah sebagai berikut:

- C18 Kita harus membantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya tetap terjaga, agar terus beraktivitas dan berproduksi (2d)
- C19 Saya minta ini diberikan prioritas khusus untuk yang *testing*, *tracing*, dan *treatment* di delapan provinsi, yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua (4a)

Berdasarkan contoh diatas, pendekatan bahasa yang mengarah pada konteks sosial tergambar dari kedua contoh tersebut. Pada contoh pertama C18 terdapat konteks sosial yang merujuk pada adanya pandemi Covid-19 sebagai masalah bersama, dari dampak yang dirasakan pun masyarakat perlu bersatu untuk membangkitkan roda perkeonomian. Sedangkan pada contoh kedua C19 mengarah

pada konteks sosial berupa prioritas khusus dari penanganan pandemi Covid-19 di beberapa daerah yang dapat dikatakan sentral.

Pada teks C18 ungkapan teks pidato "Kita harus membantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan kecil", yang menunjukkan Presiden Joko Widodo ingin mengkonstruksi citra dirinya sebagai orang yang rendah hatidan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Penciptaan makna politis yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Widodo ingin menanamkan kesan kepada publik bahwaia lebih peduli pada berlangsungnya pemerintahan yang efektif. Presiden Jokowi Widodo ingin menggalang dukungan bahwa persolan di negeri ini dapat diselesaikan apabila kita bersatu dan bekerjasama.

Makna politis dalam sistem mood yang dapat dimaknai memiliki potensi politis tercermin dalam beberapa klausa. Gambaran potensi makna politis dalam teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 merujuk pada beberapa jenis klausa mood yang tersaji pada tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 4.4

Jenis Klausa Mood dalam Interpretasi Makna Politis

Jenis Klausa	Klausa Dominan	Makna Politis
Mood		
Deklaratif	sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal	Presiden Joko Widodo ingin mengkonstruksi citra dirinya sebagai orang yang memiliki kepedulian terhadap penanganan indikasi berkembangnya kasus Covid-19 masyarakat
	Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini	Presiden Joko Widodo yang menyerukan persatuan kepada masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19
Imperatif	Saya minta ini diberikan prioritas khusus untuk	

yang testing, tracing, dan	menjadikan klausa berupa bentuk
treatment di delapan	ajakan dimaknai superior
provinsi	

Sumber: Hasil Olah dan Analisis Data Peneliti (2021)

Berdasarkan pemaparan dalam tabel 4.4 diatas, pada klausa pertama yaitu deklaratif dalam ungkapan teks pidato"*Pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi Covid-19 ataukah tidak*". Hal ini dapat dimaknai secara politis bahwa peran Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai kepala negara yang menunjukkan kepeduliannya dalam menangani penanganan pandemi Covid-19. Penggunaan teks "*sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal*", menunjukkan adanya upaya yang dilakukan berupa sikap kepedulian Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai kepala negara.

Klausa deklaratif selanjutnya juga tercermin dalam ungkapan teks pidato "Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan dan masalah sosial ekonomi yang mengikutinya". Hal ini menunjukkan secara politis peran Presiden Joko Widodo dapat dimaknai melihat upaya pekerjaan yang dilakukannya sebagai kepala negara, dengan mensinergikan pentingnya kerjasama pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Penggunaan teks "Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini", menunjukkan sikap Presiden Joko Widodo yang menyerukan persatuan kepada masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pada klausa mood kedua yaitu imperatif dalam ungkapan teks pidato "Saya minta ini diberikan prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment di delapan provinsi, yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua". Hal ini dapat dimaknai secara politis diartikan sebagai bentuk dimensi adanya hubungan kekuasaan. Hubungan kekuasaan yang mengarah pada bentuk isi pidato dalam penanganan pandemi Covid-19, dengan adanya prioritas di delapan provinsi, yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua. Penggunaan teks "Saya minta ini diberikan prioritas khusus untuk yang testing,

Ummul Khaeriyah, 2023

ANALISISS MAKNA INTERPERSONAL PIDATO POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MENANGGAPI PANDEMI COVID-19

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tracing, dan treatment di delapan provinsi", menunjukkan pernyataan Presiden Joko Widodo bersifat superior. Hal ini terlihat dari perbedaan prioritas penanganan pandemi Covid-19 dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pidato Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi bentuk ajakan yang dianggap superior yang harus dikerjakan.

Makna politis dalam modalitas yang dapat dimaknai memiliki potensi politis tercermin dalam beberapa bentuk modalitas. Gambaran potensi makna politis dalam teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 merujuk pada beberapa jenis modalitas yang tersaji pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5

Tingkatan Modalitas dalam Interpretasi Makna Politis

Tingkatan Modalitas	Klausa Dominan	Makna Politis
Tinggi	untuk selalu tanggap	Presiden Joko Widodo
		menunjukkan ia sebagai kepala
		negara yang responsif dalam
		penanganan pandemi Covid-19
Menengah	harapkan nanti yang	Presiden Joko Widodo memiliki
		harapan bentuk kerjasama dari
		setiap elemen masyarakat
Rendah	ingin ini segera	Presiden Joko Widodo ingin
		menekan kasus pandemi Covid-19
		melalui bahasa diplomatisnya

Sumber: Hasil Olah dan Analisis Data Peneliti (2021)

Berdasarkan pemaparan dalam tabel 4.5 diatas, modalitas cenderung lebih dominan menekankan aspek modalitas dinamik. Seperti dalam ungkapan teks pidato "Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia". Hal ini menunjukkan bahwa aspek politis yang tercermin dapat dimaknai adanya upaya Presiden Joko Widodo yang mencoba meminimalisir dampak pandemi Covid-19 yang dialami masyarakat. Penggunaan Ummul Khaeriyah, 2023

ANALISISS MAKNA INTERPERSONAL PIDATO POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MENANGGAPI PANDEMI COVID-19

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

teks "Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini", menunjukkan peran Presiden Joko Widodo yang mengarah pada upayanya meminimalisir dampak pandemi Covid-19 yang tidak hanya menjadi krisis kesehatan saja, tetapi menjadi krisis ekonomi.

Tingkatan modalitas yang memiliki potensi makna politis juga tercermin dalam teks pidato Joko Widodo. Nilai modalitas spada kategori tinggi muncul dari klausa "untuk selalu tanggap" yang merujuk pada bentuk keseringan. Penggunaan teks tersebut, dapat dimaknai bahwa Presiden Joko Widodo menunjukkan ia sebagai kepala negara yang responsif dalam penanganan pandemi Covid-19. Nilai modalitas kategori menengah muncul dari klausa "harapkan nanti yang" yang merujuk pada bentuk keharusan. Penggunaan teks tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo memiliki harapan bentuk kerjasama dari setiap elemen masyarakat.

Pernyataan Presiden Joko Widodo secara politik dimaknai bahwa ia sebagai pemimpin yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Dan terakhir, nilai modalitas kategori rendah muncul dari klausa "*ingin ini segera*" yang merujuk pada bentuk kecenderungan. Penggunaan teks tersebut, dapat dimaknai bahwa Presiden Joko Widodo memberikan kecenderungan ingin meminimalisir kasus pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini dimaknai secara politis menjadi bahasa diplomatis yang ingin menekan kasus pandemi Covid-19.

Aspek fungsi interpersonal yang disajikan dalam teks pidato Presiden Joko Widodo juga menunjukkan aspek-aspek mengarah pada makna politis. Suatu wacana atau teks juga memiliki kekuatan emosional, yang dapat membuat suatu teks bermakna bagi pembaca atau pendengar melalui sistem evaluasi. Sistem *appraisal* menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi makna dalam sistem tersebut. Gambaran potensi makna politis secara interpersonal dalam teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 merujuk tersaji pada tabel 4.6 dibawah ini:

Tabel 4.6
Fungsi Interpersonal dalam Interpretasi Makna Politis

Bentuk Sikap	Klausa Dominan	Makna Politis
Pengaruh	Saya mengajak seluruh jajaran	Presiden Joko Widodo
	pemerintah, baik di pusat	mengupayakan untuk
	maupun di daerah	menarik perhatian
		masyarakat agar berada
		dalam satu asumsi yang
		sama dengannya ajakan
		dalam penanganan pandemi
		Covid-19
Penilaian	nanti yang disampaikan adalah	Presiden Joko Widodo
	bukan laporan (tetapi) apa	menunjukkan adanya
	yang harus kita kerjakan	penilaian terhadap
		penanganan pandemi Covid-
		19 agar dilakukan tindakan
		yang serius
Penghargaan	Saya sampaikan penghargaan	Presiden Joko Widodo
	dan apresiasi yang tinggi dan	menghargai segala jerih
	terima kasih	payah pihak yang berperan
		dalam penanganan pandemi
		Covid-19

Sumber: Hasil Olah dan Analisis Data Peneliti (2021)

Berdasarkan pemaparan dalam tabel 4.6 diatas, pada jenis sikap kedua yang menjadi bagian dari fungsi interpersonal dalam teks pidato Joko Widodo yang merujuk pada pengaruh tercermin dalam teks "Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sampai ke level kelurahan dan desa untuk selalu tanggap terhadap situasi kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat". Penggunaan teks tersebut, dapat dimaknai secara politis bahwa Presiden Joko

Widodo menunjukkan upaya pengaruh yang diberikan untuk menangani pandemi Covid-19 dengan mengajak seluruh elemen masyarakat turut serta.

Pernyataan "Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik di pusat maupun di daerah", menjadikan tindakan Presiden Joko Widodo yang dapat dirasakan adanya ikatan emosional secara tidak langsung melalui penggunaan adanya ajakan dalam menangani pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo mengupayakan untuk menarik perhatian masyarakat agar berada dalam satu asumsi yang sama dengannya ajakan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Jenis sikap kedua yang menjadi bagian dari fungsi interpersonal dalam teks pidato Joko Widodo yang merujuk pada penilaian tercermin dalam teks "Saya harapkan nanti yang disampaikan adalah bukan laporan (tetapi) apa yang harus kita kerjakan problem lapangannya apa, sudah, dan pendek-pendek". Penggunaan teks tersebut, dapat dimaknai secara politis bahwa Presiden Joko Widodo menunjukkan adanya penilaian terhadap penanganan pandemi Covid-19 agar dilakukan tindakan yang serius.

Pernyataan "nanti yang disampaikan adalah bukan laporan (tetapi) apa yang harus kita kerjakan", dianggap sebagai bentuk penilaian moral yang ditujukan aspek pentingnya laporan faktual penanganan pandemi Covid-19 ini menyangkut kepentingan publik. Penilaian moral yang diberikan dapat dimaknai secara politis sebagai bentuk kritikan terhadap bentuk laporan yang tidak secara serius mengungkapkan problematika lapangan.

Jenis sikap terakhir yang menjadi bagian dari fungsi interpersonal dalam teks pidato Joko Widodo yang merujuk pada penghargaan tercermin dalam teks "Saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini". Penggunaan teks tersebut, dapat dimaknai secara politis bahwa Presiden Joko Widodo menunjukkan bentuk apresiasinya secara positif berupa penghargaan kepada tenaga medis. Pernyataan "Saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih", menjadikan tindakan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai kepala negara yang menghargai segala jerih payah pihak yang berperan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan temuan makna politis dalam teks pidato Presiden Joko Widodo untuk penanganan pandemi Covid-19, menunjukkan citranya menjadi seorang pemimpin dimata masyarakat. Presiden Joko Widodo seringkali menunjukkan citranya sebagai kepala negara yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat dengan mencoba menekan kasus Covid-19 hingga mengupayakan meminimalisir dampak kasus Covid-19. Selain itu, Presiden Joko Widodo secara politis banyak menunjukkan sifat superiornya, dibuktikan dengan pernyataan yang bermakna kekuasaan. Aspek yang dapat dilihat adalah bagaimana Presiden Joko Widodo banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang merujuk pada ketegasan dalam penanganan Covid-19.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Makna Interpersonal yang Direalisasikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Politik Menanggapi Pandemi Covid-19

Makna interpersonal adalah bentuk makna yang mewakili makna potensial penutur sebagai bagian dari proses interaksi, atau sebagai penutur dan pendengar, atau antara penulis dan pembaca. Peneliti menghubungkan pilihan dalam setiap teks pidato dengan situasi pandemi di Indonesia menggunakan analisis wacana. Dengan menghubungkan unsur-unsur bahasa dengan situasi sosial, makapeneliti dapat menemukan makna interpersonal yang diwakili dalam pidato.Pada tataran interpretasi gramatikal kalimat fungsional diartikan bahwa kalimat-kalimat itu terbentuk dari interaksi dalam suatu peristiwa di mana pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca terlibat.

Makna interpersonal yang didapatkan dari mood, modalitas dan kata ganti ditemukan dalam pidato Presiden Joko Widodo, terkait penanganan pandemi Covid-19 ini berupa adanya kepercayaan dan komitmen dengan cara melakukan respon cepat terhadap Covid-19. Presiden Joko Widodo seringkali menunjukkan empati hingga motivasi sampai kepada bentuk keseriusan situasi dantindakan pencegahan untuk penanganan pandemi Covid-19. Cara pemimpin negara dalam mengkomunikasikan bahasa yang memiliki maknsa untuk mengajak publik peduli terhadap permasalahan Covid-19 ini. Perkembangan bahasa akibat pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara karena ia harus meyakinkan **Ummul Khaeriyah, 2023**

ANALISISS MAKNA INTERPERSONAL PIDATO POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MENANGGAPI PANDEMI COVID-19

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penggunaan bahasa dalam komunikasi politik atau pengambilan kebijakan untuk memitigasi isu tersebut dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat. Dalam pengambilan kebijakan, Presiden melakukan komunikasi politik melalui bahasa sebagai media (Asror, 2015; Baryadi, 2015; Sueneto, 2020).

Situasi yang berbeda dari mulai awal Covid-19 hingga saat ini yang menunjukkan angka Covid-19 yang fluktuatif, ditunjukkan melalui penggunaan mood, modalitas, dan kata ganti dalam teks pidato. Semua jenis mood, modalitas, dan kata ganti ditemukan dalam pidato, peneliti menemukan bahwa ada empatmakna interpersonal yang diwakili dari mood, modalitas, dan kata ganti dalam pidatoyaitu kepercayaan dan komitmen Presiden Joko Widodo dalam merespon penanganan pandemi Covid-19 secara cepat. Selain itu, aspek empati dan motivasi juga ditunjukkan dari beberapa teks pidato yang merujuk pada dampak adanya pandemi Covid-19 seperti menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat.Dan yang terakhir adalah keseriusan situasi dan tindakan pencegahan, dimana teks pidato Presiden Joko Widodo lebih banyak penekanan terhadap kebijakan pembatasan sosial dan upaya vaksinasi. Analisis disajikan dari dua sudut pandang yaitu, analisis mood dan analisis modalitas untuk menunjukkan bagaimana mood dan modalitas berkorelasi satu sama lain dalam mewakili makna interpersonal.

Aspek penelaahan makna interpersonal ini menyangkut bentuk interaksi dan mewujudkan semua penggunaan bahasa untuk mengekspresikan sosial dan pribadi, bagaimana makna interpersonal dibangun dalam sebuah situasi. Makna interpersonal digunakan oleh Presiden Joko Widodo menjadi sarana untuk berinteraksi sebagai pembicaradan publik sebagai pendengar. Makna interpersonal Presiden Joko Widodo, mengungkapkan mengidentifikasi banyak dan ide-ide yang disampaikannya dalam pidatonya dalam menyikapi Covid-19 yang sedang marakdi masyarakat luas. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara juga menguatkan hubungan dengan publik untuk mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat dalam menyikapinya untuk masalah ini salah satunya memperketat protokol kesehatan.

Dalam *Systemic Functional Linguistics* (SFL), fungsi interpersonal digambarkan sebagai, fungsi yang membuat orang berinteraksi satu sama lain melalui Bahasa untuk mengekspresikan peristiwa interaktif tertentu yang melibatkan

pembicara dan pendengar (Damanik et al., 2020). Melalui fungsi interpersonal, kelompok sosial dipisahkan satu sama lain, individu dapat mengekspresikan dan mengidentifikasi diri mereka sendiri, memperkuat hubungan mereka dengan orang lain dan upaya untuk mempengaruhi perilaku dan sikap orang lain melalui suasana hati dan sistem modalitas.

Bentuk komunikasi yang dilakukan presiden sebagai pemimpin negara memiliki pemaknaan secara interpersonal. Secara tidak langsung, hal ini menjadikan bagian dari pengembangan lingustik seiring dengan adanya permasalahan kesehatan yang dialami masyarakat Indonesia. Bahasa menjadi salah satu alat komunikasi, yang digunakan untuk menyatakan ekspresi diri dari segala hal yang tersirat di dalam pikiraan maupun perasaan penuturnya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dipengaruhi oleh kekuatan penuturnya juga dapat berkembang karena adanya fenomena seperti Covid-19.

Teks pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pidato Politik Menanggapi Pandemi Covid-19 yang didominasi makna deklaratif. Pada kategori pertama yaitu mengarah pada bentuk informasi. Presiden Joko Widodo seringkali menyampaikan teks pidato yang memaparkan informasi mengenai kasus perkembangan dan penanganan pandemi Covid-19. Kategori selanjutnya yaitu klausa deklarasi perintah yang memiliki fungsi sebagai bentuk perintah dan penggerak dalam merealisasikan penekanan kasus pandemi Covid-19 kepada masyarakat.

Seperti yang dinyatakan oleh Eggins (2004), deklaratif adalah jenis struktur gramatikal yang biasanya kita gunakan untuk memberikan informasi dan perintah. Presiden Joko Widodo yang memposisikan dirinya sebagai seorang pembicara memberi beberapa informasi dan perintah sehingga masyarakat Indonesia dapat menerima informasi dan perintah dalam setiap kebijakan penanganan Covid-19. Melihat hasil analisis diatas dimana sebagian besar klausa bersifat deklaratif, Peneliti berkesimpulan bahwa pembicara, yaitu Presiden Joko Widodo berusaha memberikan informasi dan perintah sebanyak-banyaknya kepada audiens. Memberi banyak informasi dan perintah kepada audiens berarti dia berusaha membuat audiens

menerima sesuatu darinya yaitu ide dan kebijakan yang mengarah pada penanganan pandemi Covid-19.

Pada makna interpersonal selanjutnya adalah mood imperatif, yang mana klausa ini penegasan dari adanya perintah atau larangan. Pada teks pidato ini Presiden Joko Widodo banyak memberikan himbauan, harapan, larangan, dan peringatan kepada masyarakat mengenai pandemi Covid-19 ini. Karena pidato Presiden Joko Widodo sangat penting selama pandemi untuk memahami posisi dan sikap pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, analisis pidato sangat penting karena sebagai sebuah teks, pidato merupakan satu sistem tanda terorganisasi yang mencerminkan sikap, keyakinan, dan nilai-nilai tertentu (Jupriono, 2010). Dalam hal ini pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengimplementasikan sikap dan keyakinan untuk menjaga protokol kesehatan dalam bentuk makna bersifat deklaratif dan imperatif.

Aspek modalitas pun aspek dinamik pun dominan dengan adanya klausa yang mengarah pada kemampuan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Modalitas intensional juga banyak disampaikan dalam teks pidato Joko Widodo merujuk pada keyakinan terhadap penanganan pandemi Covid-19. Aspek modalitas juga dinilai dari tingkat kemungkinan terjadi atau tingkat kedekatan pandangan terhadap polarnya berupa probabilitas, keseringan, keharusan, dan kecenderungan. Makna interpersonal dalam modalitas ini menjadi bentuk ekspresi sikap pembicara terhadap kemungkinan atau keharusan proposisi yang diwujudkan oleh kata kerja (Kristianti, 2020). Jenis modalitas dalam pidato Joko Widodo yang menunjukkan kewajiban dan kecenderungan. Misalnya, "Saya tegaskan lagi bahwa kita harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran Covid-19", dimana kata "harus" menunjukkan kewajiban.

Pada kategori pertama yaitu tinggi (high) didominasi pada bentuk keseringan. Pada teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 ini dimaknai sebagai bentuk ajakan kepada jajaran pemerintahan pusat hingga daerah untuk selalu mempertimbangkan situasi kesehatan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kategori menengah (medium) merujuk pada bentuk keharusan. Pada teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 ini dimaknai sebagai bentuk harapan

mengenai penanganan pandemi Covid-19 dari adanya laporan permasalahan lapangan. Dan terakhir kategori menengah rendah (*low*), merujuk pada bentuk kecenderungan. Pada teks pidato Joko Widodo mengenai tanggapan pandemi Covid-19 ini dimaknai sebagai bentuk kecenderungan mengenai angka pandemi Covid-19 dalam bentuk persentase jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19.

Metafungsi makna interpersonal pada pidato Joko Widodo yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam menyampaikan kondisi pandemi Covid-19 kepada publik sebagai sarana untuk berinteraksi dalam pertukaran informasi. Penggunaan bahasa juga diwujudkan dalam pilihan nantinya akan publik gunakan dalam penerapan protokol kesehatan. Pilihan tersebut dapat dilihat melalui modalitas yang digunakan dalam interaksi yang akan publik lakukan. Webster (2019) mengungkapkan bahwa modalitas menjadi aspek lain dari makna interpersonal yang terkait dengan ekspresi sikap pembicara tentang apa yang mereka katakan. Dalam hal ini peran presiden Joko Widodo dalam menyampaikan isi teks pidatonya, bagi publik melihat dari cara penyampaiannya tersebut.

Sorotan dalam teks pidato Joko Widodo di masa pandemi Covid-19 ini lebih banyak mengungkap tentang peran pemerintah dalam menyiapkan ketersediaan alat tes dan pemantauan, sekaligus memastikan ketersediaan rumah sakit dan penyiapan tenaga medis. Selain itu, tidak hanya sekolah, kantor, tempat ibadah, dan lembaga publik yang ditutup sementara sebagai modalitas kepentingan interpersonal, karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berupa pembatasan interaksi sosial sehari-hari yang tercantum pada tulisan teks pidato Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo dalam pemaknaan interpersonalnya banyak menyampaikan wujud empati dan motivasi, yang dibingkai dalam bentuk penegasan protokol kesehatan agar penangan pandemi Covid-19 dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut muncul ketika Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan rakyatnya dengan sangat hati-hati dalam menyampaikan pidato. Penggunaan makna interpersonal yang digunakan untuk menginformasikan publik tentang nilai-nilai yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui kebijakannya, sebagai upayanya untuk meyakinkan orang lain bahwa dia adalah pemimpin yang kuat dan dia memiliki kualitas yang membuatnya cocok sebagai pemimpin negara.

Tujuan lain menggunakan suasana deklaratif dalam pidato dapat diartikan sebagai bentuk upaya dalam menunjukkan kompetensi pemimpin negara dalam menyatakan visi dan misinya (Asmara, 2016). Oleh karena itu, bagi Presiden Joko Widodo perlunya memberi tahu publik mengenai elemen-elemen upaya penanganan Covid-19, menjadi upaya untuk melindungi negara dalam mengatasi masalah. Dengan melakukan ini, Presiden Joko Widodo dapat menunjukkan kepada publik elektabilitasnya sebagai pemimpin visioner, berupa adanya kompetensi untuk membuat publik mereka percaya bahwa mereka layak untuk dipilih.

4.2.2 Potensi Makna Politis yang Disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Penggunaan Sistem Interpersonal Pidato Politik Menanggapi Pandemi Cov id-19

Pembingkaian pesan dan komunikasi dari aktor politik dipengaruhi oleh konteks dan publik yang yang akan mereka capai. Akibatnya, publik suatu bangsa dapat memengaruhi pendekatan komunikasi pemimpin mereka dalam cara yang sama seperti pesan pemimpin memengaruhi mereka. Seorang pemimpin dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan perilaku pada skala mikro dan makro terkait kebijakan yang akan dilakukan. Pesan yang disorot di media menjadi bentuk potensi makna politis, yang mengandung pemilihan dan pengutamaan isu-isu dalam masyarakat sebagai bagian dari kebijakan (Dada et al., 2021). Bahkan, pesan yang dibagikan oleh opini seorang pemimpin melalui media lebih mungkin untuk memberikan dampak kebijakan baik dengan membentuk persepsi publik tentang risiko maupun dengan membentuk persepsi pembuat kebijakan tentang opini publik.

Pada potensi makna politis yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam penggunaan sistem interpersonal pidato politik menanggapi pandemi Covid-19 dianalisis menggunakan *Systemic Functional Linguistics* (SFL). Pada pendekatan pertama yang akan ditelaah adalah bahasa adalah fenomena sosial yang terwujud dalam semiotik sosial. Penelaahan makna politis dalam isi pidato diungkapkan dalam bahasa politik yang digunakan oleh elite politik dalam memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Penggunaan bahasa politik menjadi kunci strategis yang merujuk pada sebuah kepentingan yang tampaknya menjadi kepentingan nasional (Nurhamidah, 2018).

Menurut Pierre Bourdieu kuasa simbolik (*symbolicpower*) jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini merujuk adanya keyakinan bahwa bahasa yang digunakan dalam pedoman penanganan Covid-19 dianggap tidak netral, kosong dan tidak bermakna. Itu bisa tampak alami dan polos. Namun jika ditelisik lebih dalam, bahasa sebenarnya menyembunyikan makna, pengaruh, ide, dan ideologi yang ingin disampaikan oleh penguasa. Artinya, bahasa bukan hanya alat komunikasi atau penyampaian pesan, tetapi juga alat simbolik untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankan dominasi.

Fenomena sosial yang banyak diungkapkan ini berkenaan dengan penanganan pandemi Covid-19, tidak hanya berkaitan dengan penanganan aspek kesehatan saja tetapi juga dampak lainnya salah satunya ekonomi. Pilihan kata dan perwujudannya dalam struktur klausa isi pidato Presiden Joko Widodo, dalam penanganan pandemi Covid-19 ini mencerminkan makna politis yang dimaksudkan untuk kepentingan publik. Dalam kajian sistemik linguistik fungsional aspek makna politis dalam isi pidato yang memandang penggunaan bahasa sebagai semiotika sosial di mana semogenesis (pembuatan makna) ditafsirkan oleh kontekssituasi yang pada gilirannya ditafsirkan oleh budaya (Harb & Serhan, 2020).

Penggalan isi pidato berupa "kesehatan publik tetap nomor satu, tetap yang harus diutamakan" sangat kental dengan ungkapan untuk melakukan ajakan kerjasama. Hal ini menjadi wacana politik yang menjadi diasosiasikan dengan isuisu tertentu seperti kekuasaan, konflik, kontrol dan dominasi sebagai komponen dasar wacana politik (Chilton dan Schaffer (1997) dalam Faris et al., 2016). Selama masa pandemi Covid-19, penanganan perlu dilakukan dengan cara kerjasama dari semua pihak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi tanggung jawab bersama.

Pemaknaan isi pidato menjadi bentuk retorika politik yang bermakna karena sesuai tujuan diskursus yaitu mempengaruhi massa. Presiden Joko Widodo secara politis dalam isi pidatonya memberikan ajakan kepada publik untuk mengutamakan kesehatan. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai upaya jika kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan, maka pandemi Covid-19 akan segera teratasi. Makna politis yang diungkapkan Presiden Joko Widodo mengandung bahasa yang dibentuk sesuai

dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan juga memiliki makna bahasa yang penting. Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo mengajak publik harus bersatu dan saling bekerjasama mewujudkan penanganan pandemi Covid-19 yang lebih baik. Makna politis yang disusun secara tekstual memfokuskan pada penciptaan teks berdasarkan konteks dan berfungsi untuk menyusun informasi dan sebagai bentuk komunikasi politik (Geddes et al., 2018).

Teks pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo juga mengandung banyak klausa yang lebih mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran untuk secara bersama menjadikan kesehatan sebagai aspek yang diutamakan untuk saat ini. Sistem pengembangan dalam teks pidato membentuk kesatuan informasi yang juga dapat mewakili cara berpikir pembicara berkenaan dengan kebijakan politik presiden (Rozina & Karapetjana, 2009). Pada pendekatan kedua yang akan ditelaah adalah teks yang konstrual dan merujuk pada konteks sosial. Konteks sosial merujuk pada adanya pandemi Covid-19 sebagai masalah bersama, dari dampak yang dirasakan pun masyarakat perlu bersatu untuk membangkitkan roda perkeonomian. Sedangkan pada contoh kedua C19 mengarah pada konteks sosial berupa prioritas khusus dari penanganan pandemi Covid-19 di beberapa daerah yang dapat dikatakan sentral.

Presiden Joko Widodo yang merespon pandemi Covid-19 ini, dilakukan dengan merumuskan seperangkat kebijakan yang di dalamnya memuat bahasa dan istilah-istilah seperti "protokol kesehatan" dan "Pembatasan Sosial Berskala Besar". Istilah "protokol kesehatan" dapat diartikan secara politis untuk merujuk pada bagaimana warga didorong untuk mencuci tangan dengan hati-hati, memakai masker, dan menjaga jarak sosial sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan harus dijalankan. Dalam olmu pengetahuan di bidang kesehatan pun istilah yang merujuk pada kata"protokol kesehatan" terbukti efektif menjadi salah satu upaya untuk meminimalisasi potensi masyarakat untuk terpapar Covid-19.Makna potensi politik dimaknai dari kebijakan "protokol kesehatan" ini dan terkait dengan keseriusan Presiden Joko Widodo dalam menyelamatkan nyawa rakyatnya. Makna politik yang dibentuk oleh relasi kuasa yang melibatkan banyak pihak dibentuk dengan tujuan agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Kesan biasa yang

terkandung dalam bahasa "protokol kesehatan" juga menyampaikan pentingnya ingin membuat masyarakat merasa aman.

Ketika pandemi Covid19 muncul, ahli epidemiologi mendesak negara untuk melakukan karantina wilayah dan membatasi aktivitas warga secara umum. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terhenti sementara. Agar hal itu tidak terjadi, Negara mengabaikan pendapat para ahli dan bersikeras untuk memulihkan sektor ekonomi meskipun dengan berbagai pembatasan. Pusat perbelanjaan dibuka, tempat hiburan dioperasikan, roda industri diputar, dan masyarakat juga didorong untuk terus melakukan kegiatan ekonomi produktif. Untuk melegitimasinya, negara menggunakan "protokol kesehatan" sebagai senjata. Dalam arti, segala bentuk kegiatan produktif yang semula harus ditekan sedapat mungkin sebenarnya memiliki legitimasinya karena dianggap melaksanakan "protokol kesehatan".

Wacana dalam pidato politik memiliki muatan kekuasaan. Pihak yang sedang berorasi mendominasi pendengar atau pembaca. Para pendengar atau pembaca dapat dengan mudah dikontrol dan dipengaruhi untuk melakukan tindakan tertentu. Praktik seperti ini disebut sebagai bentuk praktik pendominasian melalui bahasa (Asmara, 2016). Hal ini sejalan dengan pendapat Pierre Bourdieu *dalam*Haryatmoko (2003) bahwa praktik ini sebagai penentu kultural-ideologis yakni pengaruh dominan dari kelas yang berkuasa melalui institusi formal dan manipulasi sistemis atas teks dan pemaknaanya.

Presiden Indonesia Joko yang mengungkapkan "Jangan ragu untuk menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatannya", secara kolektif menunjukkan makna politis berupa paternalisme dan tanggung jawab. Baik paternalisme dan tanggung jawab menjadi alat penting dari retorika emosional yang digunakan oleh semua pemimpin untuk memotivasi warganya untuk mematuhi pedoman baru yang diterapkan (Dada et al., 2021).

Secara substansi, pendominasian meliputi bagaimana seseorang, kelompok, tindakan, atau kegiatan dipresentasikan dalam teks. Pendominasian terbagi menjadi dalam dua hal penting, yakni (1) peran dan posisi aktor dan (2) gagasan yang disampaikan menggunakan kata, kalimat, dan wacana yang dirangkai untuk

membentuk tujuan tertentu (Pierre Bourdieu *dalam* Haryatmoko, 2003). Eriyanto (2012) menekankan pada tiga hal terkait pendominasian, yaitu (1) isi, berhubungan dengan apa yang diucapkan atau dilakukan, (2) relasi, memfokuskan pada hubungan sosial yang ditampilkan dalam wacana, dan (3) subjek atau posisi yang ditempati seseorang.

Potensi makna politis yang disampaikan presiden Joko Widodo dalam penggunaan sistem interpersonal pidato politik menanggapi pandemi Covid-19, adanya penanganan yang mengarah pada pedekatan bersifat konteks sosial. Secara substansi, pendekatan SFL meletakan bahasa sebagai sebuah sistem makna, bentuk dan ekspresi untuk merealisasikan makna tersebut. Dua konsep teori SFL menurut Halliday & Hasan (1992), *pertama*, bahasa adalah fenomena sosial yang terwujud dalam semiotik sosial. Hal ini berarti bahwa pidato politik Presiden Joko Widodo terkait dengan fenomena sosial yakni pandemi Covid-19 yang direalisasikan melalui penggunakan bahasa yang mengandung semiotik sosial. *Kedua*, bahasa adalah teks yang konstrual dan merujuk pada konteks sosial. Hal ini berarti bahwa pidato politik Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam teks yang dapat diinterpretasi dan juga pidato tersebut merujuk pada konteks sosial tertentu yaitu pandemi Covid-19.

Penggunaan modalitas dalam kedua pidato politik Presiden Joko Widodo tersebut mengungkapkan makna interpersonal yang berbeda. Probabilitas tinggi pada pidato pertama menunjukkan komitmen dan kepercayaan pembicara. Hal ini ditunjukkan dari bentuk ajakan kepada jajaran pemerintahan pusat hingga daerah untuk selalu mempertimbangkan situasi kesehatan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Selanjutnya pada probabilitas yang bersifat menengah lebih mengarah pada bentuk harapan mengenai penanganan pandemi Covid-19 dari adanya laporan permasalahan lapangan. Dan terakhir probabilitas yang bersifat rendah, merujuk pada bentuk empati dan rasa terima kasih sedangkan pidato kedua menunjukkan keseriusan situasi selama pandemi. Hal ini terlihat dari pengungkapan mengenai angka pandemi Covid-19 dalam bentuk persentase jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19.

Menurut Kristianti (2020) adanya kebiasan dan kecenderungan dalam pidato politik yang disampaikan Presiden Joko Widodo mengungkapkan perjuangan dan

inisiatifnya untuk melindungi negaranya. Secara umum, modalitas yang digunakan merujuk pada bentuk komitmen dan tekad kuat dalam penanganan pandemi Covid-19. Melalui penelitian ini juga dapat dilihat bahwa konteks sosial dapat mempengaruhi penafsiran dan penerapan kategori modalitas karena modalitas tidak dapat didefinisikan hanya dengan melihat derajat suatu teori yang ada tanpa mengaitkannya dengan situasi atau konteks sosial.

Penggunaan makna bersifat deklaratif dalam pidato politik yang disampaikan Presiden Joko Widodo dapat diartikan memiliki potensi makna untuk menginformasikan kepada publik tentang nilai-nilai yang dilakukan Joko Widodo seperti yang dikemukakan sebelumnya dianggap sebagai upayanya untuk meyakinkan orang lain bahwa dia adalah pemimpin yang kuat, memiliki empati, dan dia memiliki kualitas yang membuatnya cocok untuk menjadi pemimpin negara.

Hal lain juga mengarah pada bagaimana Joko Widodo melalui teks pidatonya dalam penanganan Covid-19 menyampaikan kompetensi individunya berupa visi misi. Dengan menggunakan suasana deklaratif, tersebut seringkali pemimpin negara ingin memberi tahu publik mereka tentang kemana dia akan melindungi negara mereka dalam mengatasi masalah tersebut (Damanik et al., 2020). Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin di Indonesia secara makna politis dalam isi pidatonya sering menyampaikan pentingnya warga negara mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri dan mematuhi pedoman pemerintah dalam hal kesehatan, dengan tujuan meminimalisir kasus Covid-19. Secara tidak langsung, isi pidato Joko Widodo ini menyoroti dua bentuk daya tarik emosional yang digunakan untuk menyampaikan pesan ini bermakna tanggung jawab. Pada makna politis adanya tanggung jawab dianggap sebagai retorika yang mendorong individu untuk bertindak secara independent (Dada et al., 2021).

Pandemi Covid-19 membawa arah baru bagipeta perpolitikan di Indonesia melalui aspek linguistik. Hubungan tersebut berubah karena terjadinya pandemi yang membuat partaipartai tersebut mengevaluasi ulang arah dan kebijakan politiknya di era selama pandemi Covid-19 ini. Menurut Aji (2020) tiga parameter kepentingan politik melekat dalam kata-kata pidato Presiden Joko Widodo: Pertama, perubahan ekosistem politik akibat pandemi Covid-19 ditandai dengan menguatnya

peran pemerintah dalam mengelola krisis. Dalam setiap krisis ada kecenderungan untuk memperkuat peran penguasa, baik karena alasan yang berkaitan dengan bencana, perang atau krisis lainnya. Atas nama mengatasi krisis, pemerintah dapat melakukan apa saja yang dianggap perlu. Dalam kondisi tersebut, pemerintah pada umumnya memiliki banyak hak dan bahkan *privilege*, termasuk menetapkan berbagai aturan yang bersifat restriktif atau diskresi.

Selain itu, dalam teks pidatonya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pernyataan tentang hak menggunakan segala sumber daya yang ada untuk dapat mengeluarkan negara dari kondisi krisis, bukan hanya karena pandemi Covid-19, tetapi juga karena Covid-19, yang disebut dengan krisis ekonomi. Hal ini memungkinkan negara untuk menetapkan peraturan khusus untuk penggunaan sumber daya secara maksimal. Di negara kita bahkan dimungkinkan adanya kebijakan terkait pandemi tanpa pengawasan, asalkan dilandasi "*itikad baik*" untuk menyelesaikan masalah Covid-19. Dengan melihat ekosistem politik seperti itu, nuansa penguatan peran dan posisi pemerintah atau negara tidak dapat dielakkan lagi, yang disoroti Presiden Joko Widodo dalam sambutannya tentang cara menghadapi pandemi Covid-19.